BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
KABUPATEN MUKOMUKO
JUMAT, 9 NOVEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

2 Kasus Korupsi Dilimpahkan

2 Kasus Korupsi Dilimpahkan

MUKOMUKO-Dua kasus korupsi di Kabupaten Mukomuko sudah didaftarkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.Yakni kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan provinsi di Mukomuko, serta kasus dugaan korupsi kegiatan lomba desa.

Dalam kasus korupsi tersebut, ada enam tersangka yang dilimpahkan. Terdiri tiga tersangka kasus proyek jalan dan tiga tersangka lagi kasus lomba dana desa.

''Pelimpahan berkasnya hari ini (kemarin-red) oleh JPU yang sudah ditunjuk," kata Kajari Mukomuko Agus Irawan Yustisianto, SH, MH ditemui di ruang kerjanya, kemarin (8/11).

Kasus dugaan korupsi proyek jalan provinsi itu, adalah proyek pembangunan jalan lapen di simpang Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko tahun 2016. Tiga tersangka itu inisial TW (PPTK), RM (kontraktor) dan SF sebagai KPA.

Sedangkan kasus dugaan korupsi kegiatan lomba desa itu tersangkanya BU (Kadis), Ah (PPTK), dan Ta (bendahara) dalam kegiatan tersebut.

Menurut Kajari, lebih cepat sidangnya lebih baik. Jadi salah satu perkara Tipkor yang ditangani Kejari, dapat segera diadili. Serta mendapat kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

''Kita sekarang tinggal menunggu jadwal sidangnya dari hakim Pengadilan Tipikor. Untuk berkas para tersangka, terpisah. Disesuaikan dengan perannya masing-masing," terang Kajari.

Lebih lanjut dikatakannya, perkara yang mereka tangani itu, yakni proyek jalan provinsi yang diduga merugikan negara mencapai Rp 600 juta. Ini karena, ada pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai kontrak. Tetapi pekerjaan itu anggarannya dicairkan 100 persen.

Sedangkan kegiatan lomba desa, juga ada item kegiatan yang tidak dilaksanakan, serta dugaan mark up. Dengan kerugian sekitar Rp 100 juta lebih.

''Untuk lebih mendetailnya, akan disampaikan ketika di persidangan. Kerugian negara didua perkara itu, sudah dihitung oleh tim ahli. Kalau sumber anggaran, proyek jalan provinsi didanai APBD provinsi. Kalau lomba desa dari APBD Kabupaten," demikian Kajari.